

ABSTRAK

KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Oleh

ASA CLAUDIA

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting di Indonesia. Namun, seringkali prosesnya diwarnai berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas dan kredibilitas hasil pemilihan. Bawaslu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam pemilu, memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan lembaga penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan kepala daerah, mengevaluasi efektivitas dan konsep kedepan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang dianalisis dengan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi TSM terdapat hierarki kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan TSM pada lembaga terkait. Efektivitas penyelesaiannya sudah optimal dalam menangani pelanggaran administrasi TSM menggunakan peraturan yang ada dan langkah-langkah penguatan kedepan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM berupa penguatan regulasi, sdm dan teknis operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas Pilkada, perlu adanya penguatan kerangka regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait pelanggaran TSM, peningkatan kapasitas Bawaslu, serta perbaikan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu dan lembaga peradilan. Dengan demikian, setiap pelanggaran dapat ditangani secara lebih efektif, transparan, dan adil, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dapat terjaga.

Kata Kunci : Kewenangan Lembaga, Efektivitas, Pelanggaran Administrasi TSM

ABSTRACT

THE COMPETENCE OF INSTITUTIONS FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF REGIONAL HEAD ELECTIONS IN A STRUCTURED, SYSTEMATIC AND MASSIVE MANNER

By

ASA CLAUDIA

The election of regional heads is one of the important pillars of democracy in Indonesia. However, often the process is colored by various forms of violations that can damage the integrity and credibility of the election results. Bawaslu, as an institution responsible for the supervision and enforcement of violations in elections, has the authority to supervise and take action against violations that occur. This study aims to analyze the authority of institutions to resolve election administration violations in a structured, systematic, and massive manner in the election of regional heads, evaluate the effectiveness and future concepts in resolving election administration violations in a structured, systematic, and massive manner. This research is a normative research with a conceptual approach, laws and regulations and case studies analyzed with legal interpretation. The results of the study show that although Bawaslu has the authority to handle TSM administrative violations, there is a hierarchy of authority in resolving TSM election administrative violations in related institutions. The effectiveness of the solution has also been optimal in handling TSM administrative violations using existing regulations and future strengthening steps in resolving TSM administrative violations in the form of strengthening regulations, human resources and operational technical. This study concludes that to improve the integrity and credibility of the Regional Elections, it is necessary to strengthen a clearer and firmer regulatory framework related to TSM violations, increase the capacity of Bawaslu, and improve coordination and synergy between Bawaslu and judicial institutions. Thus, any violation can be handled more effectively, transparently, and fairly, so that public trust in the election process can be maintained.

Keywords: Institutional Authority, Effectiveness, TSM Administrative Violations